



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Ada 4 Ribu Kantor Pos: DPR Usul Bentuk Holding Logistik
Tanggal	: Senin, 06 Februari 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Ada 4 Ribu Kantor Pos **DPR Usul Bentuk Holding Logistik**

SENAYAN mengusulkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding industri logistik. Di mana yang menjadi pemimpin dari holding tersebut adalah PT Pos Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, saat ini banyak anak usaha BUMN yang bergerak dalam bidang logistik. Sehingga dengan dibentuknya holding diharapkan bisa memudahkan bisnis industri logistik negara bersaing dengan perusahaan logistik swasta.

“Jadi sebenarnya (industri logistik) bisa dikonsolidasikan agar size-nya bisa lebih besar sehingga secara skala ekonominya lebih dapat,” ujar Martin dalam keterangannya, kemarin.

Usulan holding industri logistik tersebut, lanjutnya, akan dibahas dalam rapat Komisi VI DPR. Namun sebelum itu, PT Pos Indonesia diminta terlebih dahulu membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di internalnya.

Selama ini banyak orang tidak sadar bila PT Pos itu sebenarnya BUMN dan bukan badan layanan umum aja. “Karena memang ada dua karakter ini (PT Pos) harus punya dua jenis SDM yang berbeda,” saran politikus Nasdem ini.

Dia mendukung langkah PT Pos melakukan transformasi pelayanan dan bisnis logistik guna mendorong pertumbuhan serta menggerakkan ekonomi di perusahaan, daerah, dan

nasional. Apalagi, perusahaan tersebut mempunyai aset sangat besar sehingga mudah untuk mewujudkan hal itu.

“PT Pos memiliki 4 ribu Kantor Pos di seluruh Indonesia. Tinggal kualitas dari pelayanannya harus baik, sehingga ketika orang memakai jasa memiliki nilai tambah dan bukan sekadar jasa kurir atau logistik lainnya,” jelasnya.

Martin menilai, bisnis logistik PT Pos Indonesia punya peran penting dalam mengintegrasikan keutuhan wilayah Indonesia. Mengingat, perusahaan tersebut melayani hingga pelosok negeri. Sehingga, kehadiran Pemerintah melalui PT Pos penting agar koneksiitas untuk barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia itu bisa terlayani dengan baik.

“Kita negara kepulauan sehingga peran PT Pos bisa mengintegrasika

“Bila peran ini diserahkan ke swasta, pasti hanya akan masuk di daerah-daerah yang memiliki margin profit lebih tinggi,” ucap legislator Dapil Sumatera Utara II ini.

Martin menilai, transformasi bisnis PT Pos mesti dilakukan agar bisa tetap relevan dengan zaman dan juga bisa terus bersaing dengan perusahaan logistik swasta. Terlebih, persoalan dalam 2 tahun terakhir mengalami transformasi untuk bisa menyesuaikan aktivitas bisnisnya. “Kita tahu sejarah PT Pos itu sudah lama, tapi dengan sekarang digitalisasi, tentu harus bisa *keep up* dengan zaman ini,” tegasnya. ■ KAL